

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah sebagai pengelola keuangan masyarakat dituntut untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas Publik di Indonesia dimulai sejak reformasi keuangan Negara yang ditandai dengan diterbitkannya UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pada masa 1974–1999, pencatatan transaksi keuangannya menggunakan metode tata buku tunggal berbasis kas (cash-based accounting). Bendahara mencatat setiap kas masuk dan kas keluar baik yang langsung melalui tangannya maupun perantara bank.

Metode tata buku tunggal memiliki banyak kelemahan, misalnya sulit melakukan cross-check ketika melakukan pemeriksaan/perhitungan realisasi anggaran. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yang mengamanatkan pemerintah paling lambat sudah menerapkan akuntansi basis akrual (accrual based accounting) pada tahun 2015. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual Basis) menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 Tentang standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan basis kas menuju akrual.

Standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat

terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Menurut AB Triharta, dalam Suara Merdeka.com (2012), standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan standar akuntansi pemerintahan yang mengadopsi standar Akuntansi pemerintahan internasional (IPSAS). Standar ini, sudah digunakan di beberapa negara Amerika dan Eropa. Tapi di tingkat Asia Tenggara, baru Indonesia yang akan menerapkan. Penerapan basis akrual pada akuntansi bertujuan untuk memperbaiki keterbatasan dan ketidakcukupan informasi yang disediakan oleh basis kas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaksi terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan belum diterima. Pada bulan Desember tahun 2013 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 tahun 2013 yang merupakan regulasi yang mengatur tentang implementasi Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

Terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010, menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005 mengenai hal sama. Walaupun sudah dinyatakan tidak berlaku secara substansial PP 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan paling lambat sampai tahun 2014 karena pada tahun 2015 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menggunakan akuntansi berbasis akrual dengan diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Namun sampai dengan waktu yang ditentukan penerapan akuntansi berbasis akrual khususnya wilayah pemerintah Sumatera Selatan masih belum direalisasikan secara penuh sehingga target penerapan akuntansi berbasis akrual harus di undur lagi, dari tahun 2015 sampai sekarang pemerintah Kabupaten/Kota

di wilayah Sumatera Selatan sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh (*full accrual*) dalam penyusunan laporan keuangan. Berikut daftar opini atas laporan keuangan di wilayah Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

OPINI BPK ATAS LKPD TAHUN 2010 S.D 2017									
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN									
No	Entitas	OPINI							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Provinsi Sumsel	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Lubuk Linggau	WDP	WTP						
3	Kabupaten Oki	WDP	WTP						
4	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
6	Kabupaten Banyu Asin	WDP	WTP						
7	Kabupaten Oku Timur	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Oku Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Lahat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Empat Lawang	WDP	WDP	*TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12	Kota Prabumulih	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kabupaten Oku	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten Muara Enim	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kabupaten Musi Rawas	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
16	Kota Pagar Alam	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kabupaten Muratara	-	-	-	-	*TMP	WDP	WDP	WTP
18	Kabupaten Pali	-	-	-	-	*TMP	WDP	WTP	WDP

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

*WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat

TW : Tidak Wajar

Berdasarkan tabel di atas, opini atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun 2010- 2017 masih ada yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dan penyebabnya adalah penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Menurut pendapat Surya Negara sebagai Kaper BPK Sumatera Selatan, penyebab wilayah Sumatera Selatan belum maksimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual kurangnya SDM yang kompeten dan

kurangnya komitmen dalam suatu organisasi. Dengan demikian penerapan akuntansi berbasis akrual pada Provinsi Sumatera Selatan masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Oleh karena konsep akuntansi berbasis akrual ini masih sangat baru maka menyebabkan adanya strategi khusus untuk menerapkan akuntansi basis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur. Kesuksesan penerapan akuntansi berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Untuk itu diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual tersebut dan kerja sama dari berbagai pihak.

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi dengan variabel dependennya Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah harus tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Karena sumber daya manusia merupakan semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan pada pemerintah

Faktor ketiga adalah Sarana prasarana yang merupakan alat penunjang keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dalam upaya yang dilakukan pada pemerintahan, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan

yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Nugraihni, dkk (2008) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sarana prasarana khususnya komputer, printer, dan software sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Faktor terakhir adalah teknologi informasi yang terdiri dari hardware dan software yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. (Surya, 2015) juga mengatakan bahwa BPKP telah memberikan jalan keluar bagi pemerintah daerah dengan mengimplementasikan aplikasi Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang sudah mengadopsi akuntansi berbasis akrual.

Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak seragam sehingga penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual perlu diteliti kembali. Perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya juga memberikan acuan yang cukup bagi penulis untuk melakukan penelitian kembali tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan SAP berbasis akrual

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu *Pertama*, terdapat pada objek penelitian, pada penelitian ini peneliti akan meneliti pada BPKAD dengan respondennya adalah Pegawai/staf Keuangan, perbedaan *Kedua*, terletak tahun penelitian yang mana penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2019 dan perbedaan yang *Ketiga*, terletak pada variabel penelitian pada masing masing peneliti terdahulu menggunakan variabel independen beragam yaitu Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Komunikasi, Kualitas Teknologi Informasi, dengan variabel Dependen Penerapan SAP Berbasis Akrual. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Komitmen Organisasi, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi dengan variabel dependennya adalah keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu serta

didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti kembali tentang **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI ?
2. Bagaimana pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI ?
3. Bagaimana pengaruh Sarana Prasarana terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI ?
4. Bagaimana pengaruh Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI ?
5. Bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI
2. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan unit pengamatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai entitas pelaporan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua
2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua
3. Untuk mengetahui pengaruh Sarana Prasarana terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua
4. Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua
5. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Sarana Prasaran, dan Teknologi Informasi terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, komitmen organisasi, sarana prasarana, dan teknologi informasi. Terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

2. Manfaat Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Sarana Prasarana, dan Teknologi Informasi dalam Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan